

## PENGUJIAN EFEK MODERASIAN E-GOVERNMENT PADA HUBUNGAN ICT DEVELOPMENT DAN MOBILE PAYMENT DENGAN LEVEL KORUPSI DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG

Eri Kartika<sup>1)</sup>, Darlin Aulia<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Akuntansi, Universitas Media Nusantara Citra

<sup>2)</sup>Akuntansi, Universitas Telkom Surabaya

<sup>1,2)</sup>[eri.kartika@mncu.ac.id](mailto:eri.kartika@mncu.ac.id), [darlin.aulia@mncu.ac.id](mailto:darlin.aulia@mncu.ac.id)

### ABSTRACT

*Several studies have stated that ICT development, mobile payments, and e-government have an impact on corruption, although other studies say they have no effect on corruption. This study aims to analyze the impact of ICT development and mobile payment with or without e-government moderation on the corruption index in developed and developing countries. This study also adds control of corruption data as a control variable. Researchers used the cross-section method to process data samples consisting of 59 developed countries and 72 developing countries. The approach used is a quantitative approach, and the data used are secondary data published in 2017 and 2018. The results show that there is a significant influence between ICT development, mobile payment, and e-government moderation on corruption in developed countries. Meanwhile in developing countries, the significant influence is only shown by ICT development towards corruption without e-government moderation. This study only focuses on corruption in the public sector in developed and developing countries.*

### ABSTRAK

Sejumlah penelitian menyatakan *ICT development*, *mobile payment*, dan *e-government* berpengaruh terhadap korupsi, meskipun penelitian lainnya mengatakan tidak ada pengaruhnya terhadap korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *ICT development* dan *mobile payment* dengan atau tanpa moderasi dari *e-government* terhadap indeks korupsi di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini juga menambahkan data *control of corruption* sebagai variabel kontrol. Peneliti menggunakan metode *cross-section* untuk mengolah sampel data yang terdiri dari 59 negara maju dan 72 negara berkembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terbit di tahun 2017 dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara *ICT development*, *mobile payment*, dan moderasi *e-government* terhadap *corruption* di negara maju. Sedangkan di negara berkembang, pengaruh signifikan hanya ditunjukkan oleh *ICT development* terhadap *corruption* tanpa moderasi *e-government*. Penelitian ini hanya berfokus pada korupsi di sektor publik di negara maju dan negara berkembang.

**Kata kunci:** *ICT development, mobile payment, e-government, control of corruption, corruption.*

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang meliputi berbagai hal, mulai dari penyuapan hingga pencurian dana publik (*Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight against Corruption*, 2020). Menurut United Nation dalam *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight against Corruption*, (2020) korupsi dapat dikatakan sebagai fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks, dan mempengaruhi semua negara di dunia. Berdasarkan laporan tahunan *Corruption Perception Index 2017* dari *Transparency International Organization*, negara-negara berkembang pada wilayah Sub-Sahara Afrika menjadi wilayah dengan kasus korupsi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari skor survei negara-negara di Afrika yang umumnya

dibawah 30, khususnya Sudan dan Somalia yang masih menjadi negara dengan skor tiga terendah di dunia selama 5 tahun terakhir (2017-2021). Bahkan di negara-negara di Eropa yang tergolong maju juga tidak luput dari korupsi. Menurut laporan *EU Anti-Corruption Report 2014*, terdapat seperempat atau 26% orang Eropa yang mempertimbangkan bahwa secara pribadi mereka telah dipengaruhi oleh korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Kubbe, 2015). Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa korupsi terjadi di berbagai negara dan menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

Korupsi termasuk tindakan penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang meliputi berbagai hal, mulai dari penyuapan hingga pencurian dana publik (*World Bank*, 2020). Menurut *World Bank* dalam *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The*

Fight against Corruption, (2020) korupsi dapat dikatakan sebagai fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks, dan mempengaruhi semua negara di dunia. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan publik, memperlemah demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan (Transparency International, 2020). Korupsi juga dapat menyebabkan perpecahan di suatu negara dan memiliki efek tidak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan inklusif (IMF, 2018).

Korupsi dapat terjadi pada berbagai lapisan atau kelompok masyarakat. Transparency International melakukan survei yaitu Global Corruption Barometer 2017: Citizen's Voices from around the World, 2017 yang dimulai dari Maret 2015 hingga Januari 2017. Sebanyak 162.136 orang dari 119 negara di dunia diwawancarai untuk mengetahui persepsi dan pengalaman responden terkait korupsi negaranya. Diketahui dari seluruh negara yang disurvei, Persemakmuran Negara-Negara di Eurasia, Timur Tengah, dan Afrika Utara memiliki tingkat kasus suap tertinggi yaitu sebesar 30%. Diikuti wilayah Amerika Latin dan Karibia 29%, Asia Pasifik 28%. Secara keseluruhan hasil survei disimpulkan hampir 1 dari 4 orang di dunia melakukan suap untuk layanan publik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017 mengungkapkan 576 kasus korupsi dengan 1.298 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 482 kasus korupsi dengan 1.101 orang tersangka, dan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Menurut ICW, penyalahgunaan anggaran merupakan modus kasus korupsi tertinggi yaitu 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Modus korupsi lainnya adalah mark up 77 kasus, pungutan liar 71 kasus, penyalahgunaan wewenang 61 kasus, laporan fiktif 56 kasus, proyek fiktif 54 kasus, penggelapan 44 kasus, suap 42 kasus, pemotongan 10 kasus, pemerasan 3 kasus, dan mark down 2 kasus.

Disisi lain penggunaan TIK di dunia semakin pesat di berbagai sektor dan proses bisnis termasuk pemerintahan. Sebab TIK berkontribusi secara signifikan dalam produktivitas, pertumbuhan dan efisiensi (Farooqi et al., 2020). Negara-negara maju telah menggunakan dasar TIK sebagai alat sederhana untuk memfasilitasi pekerjaan administratif yang terstruktur dan terintegrasi di seluruh operasi pemerintah (Evans, 2018). Demikian pula pada negara-negara berkembang seperti Bangladesh yang berupaya menciptakan lingkungan penyebaran TIK yang cepat diseluruh lapisan masyarakat (Sakil, 2018). TIK berdampak besar pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sebab dapat memperluas dan mendiversifikasi saluran administrasi publik dan membuka cara

komunikasi baru untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menggunakan data dan informasi publik yang relevan dengan masyarakat (Alderete, 2018). Teknologi informasi menjadi salah satu pemicu penting yang akan menonjol dalam semua aspek pemerintahan dan reformasi administrasi, sehingga memberi banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi manajerial internal, pengambilan keputusan, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Kalu, 2019).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sistem *e-government* dapat membantu dalam mengurangi korupsi diantaranya Adam, Ibrahim & Alhassan, (2020); I. Adam & Fazekas, (2018); K. Lee *et al.*, (2018); Q. M. Lee, (2017). Menurut penelitian Adam, Ibrahim & Alhassan, (2020), *e-government* yang dimediasi oleh ICT *Development* dan kualitas kelembagaan akan berdampak positif pada korupsi. Penelitian I. Adam & Fazekas, (2018) juga menunjukkan bahwa TIK mempengaruhi pekerjaan semua pihak yang terlibat dalam atau melawan korupsi, termasuk lembaga publik, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan media. Demikian pula penelitian K. Lee *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa perkembangan TIK yang disertai dengan reformasi administrasi dan tuntutan untuk keterlibatan yang lebih besar dalam urusan pemerintahan oleh masyarakat negara, telah mempercepat munculnya sistem *e-government* untuk transparansi di sektor publik dan diharapkan dapat menurunkan korupsi. TIK memiliki peran penting dalam memerangi korupsi sebab menawarkan beragam peluang *digital* kepada publik (Adam, Ibrahim & Alhassan, 2020).

TIK dapat dikembangkan secara khusus pada setiap proses pemerintahan seperti pada sistem pembayaran pemerintah. Beberapa penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa transaksi pembayaran secara elektronik atau melalui seluler juga dapat mengurangi tingkat korupsi di suatu negara diantaranya Barasa, (2021) dan Setor *et al.*, (2021). Global System for Mobile Communication Association (GSMA) melakukan sebuah penelitian pada tahun 2019 yang berjudul *Digitalising Person to Government Payment* pada 46 negara yang meliputi Sub-Sahara Afrika, Asia, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika Utara. Hasil penelitian tersebut menandai bahwa *mobile money* digunakan secara luas baik untuk transaksi sederhana atau kompleks. Secara sederhana *mobile money* dapat digunakan untuk satu layanan pada satu sektor publik. Sedangkan secara kompleks *mobile money* dapat digunakan pada berbagai sektor publik.

Sistem pembayaran dengan *mobile money* berdampak pada peningkatan transaksi non-tunai. Berdasarkan World Payment Report 2017 (Capgemini & BNP Paribas, 2017), pertumbuhan transaksi non-tunai meningkat sebanyak 11.2% selama tahun 2014 hingga tahun 2015. Jumlahnya

mencapai 433.1 Miliar transaksi dan merupakan angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. Wilayah negara-negara Asia Pasifik merupakan wilayah dengan peningkatan terbesar yaitu 43,4%. Lalu diikuti oleh wilayah CEMEA (Eropa Pusat, Timur Tengah, dan Afrika) sebesar 16,4%. Cina dan India adalah dua negara yang diperkirakan akan menjadi pasar berpotensi besar dan mengalami pertumbuhan bunga yang signifikan. Cina mengadopsi secara berkelanjutan *mobile payment* sehingga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan stabil sebesar 36% selama 2016–2020. Adanya kebiasaan melakukan *mobile payment* di Cina berdampak pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan *mobile payment* (mpay) yang bertumbuh dengan sehat.

PwC menerbitkan hasil survei terkait penggunaan transaksi *mobile payment* dalam *Mobile Payment Report 2019* (Beutin & Harmsen, 2019). Survei tersebut dilakukan di enam negara yaitu Austria, Belanda, Belgia, Jerman, Swiss, dan Turki. Diketahui penggunaan *mobile payment* sangat populer di Turki yaitu mencapai 65%. Diikuti oleh Belanda dengan penggunaan *mobile payment* mencapai 51%. Sebanyak 67% pengguna *mobile payment* di Turki dan Belanda berusia dibawah 30 tahun. Di Belgia pengguna *mobile payment* mencapai 47% dan 67% diantaranya berusia dibawah 30 tahun. Sedangkan Jerman merupakan negara dengan tingkat penggunaan *mobile payment* terendah dibandingkan negara-negara lain yang disurvei, yaitu 25%.

Penelitian yang dilakukan oleh Setor et al., (2021) menunjukkan bahwa transaksi digital dapat mengurangi korupsi pada negara-negara berkembang. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Barasa, (2021) yang menunjukkan bahwa *mobile payment* dapat secara efektif mengurangi kerentanan perusahaan terhadap korupsi kecil-kecilan. *Mobile payment* dalam kaitannya dengan korupsi dapat menjadi suatu alat intervensi anti korupsi yang praktis dan efektif (Barasa, 2021). Korupsi dapat mudah terjadi pada pembayaran tunai, dimana transaksi dapat dimanipulatif dengan mudah. Selain itu pencatatan transaksi pembayaran tunai memungkinkan adanya kesalahan pencatatan yang disengaja atau tidak. Akibatnya pencatatan pembayaran menjadi tidak transparan dan akurat. Berbeda dengan pembayaran tunai, umumnya *mobile payment* dilengkapi suatu sistem yang dapat merekam catatan transaksi secara rinci dan lengkap. Sistem *mobile payment* akan mencatat transaksi pembayaran secara *real-time* sehingga dapat meminimalisir kekurangan pencatatan. Melalui sistem tersebut penelusuran transaksi juga akan lebih mudah dilacak sehingga akan meningkatkan transparansi, keakuratan dan akuntabilitas.

Berdasarkan survei Transparency International dalam lima tahun terakhir, Indonesia masih berada di peringkat menengah ke bawah sebagai negara yang bebas korup meskipun peringkat global CPI cenderung turun. Disisi lain

penggunaan TIK terutama jaringan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada Juni 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia 10 besar tertinggi Asia menurut survei dari internetworldstats (Internet World Stats, n.d.). Tingginya angka pengguna internet ini juga didorong dengan populernya sistem pembayaran non-tunai, seperti seperti dompet seluler (E-Wallet). Berdasarkan Mobile Wallets Report 2021 (Boku, 2021), penetrasi dompet seluler di Indonesia akan meningkat dalam lima tahun kedepan. Adanya penurunan korupsi yang diiringi dengan peningkatan pengguna jaringan internet dan E-Wallet membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh diantara hal tersebut. Namun pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengembangan TIK (ICT development) dan pembayaran seluler (*mobile payment*).

Peneliti menggunakan data dari Transparency International's: Corruption Perception Index untuk mengukur variabel korupsi, The Global Data Findex untuk mengukur penerimaan transaksi variabel independen *mobile payment*, dan *ICT Development Index* untuk mengukur variabel independen ICT development. Peneliti juga menggunakan data dari E-Government Development Index untuk mengukur variabel moderator *e-government*. Lalu peneliti juga menambahkan data dari Worlwide Governance Indicators untuk mengukur variabel kontrol. Berbeda dengan penelitian Adam, Ibrahim & Alhassan (2020); I. Adam & Fazekas, (2018); K. Lee et al., (2018), peneliti menjadikan *e-government* sebagai mediator ICT development, dan tidak hanya mengambil sampel dari negara-negara berkembang seperti penelitian Setor et al., (2021) tetapi juga di negara-negara maju, serta berfokus pada *mobile payment* di pemerintahan. Peneliti juga tidak hanya berfokus pada korupsi kecil seperti Barasa, (2021) melainkan korupsi secara umum di pemerintahan. Selain itu peneliti menggunakan alat pengujian hipotesis *Eviews* bukan SPSS seperti penelitian Verani, (2021). Data yang digunakan adalah data yang terbit di tahun 2017 dan 2018, sebab belum ditemukan data tahunan terkait variabel penelitian di setiap negara. Penelitian ini penting dilakukan sebab pada umumnya ICT yang menjadi moderator pada *e-government*, dan di Indonesia belum banyak terdapat penelitian terkait topik *digital payment* khususnya *mobile payment* terhadap tingkat korupsi. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai upaya mengurangi korupsi dengan berfokus pada ICT development dan pengadopsian sistem *mobile payment* sebagai intervensi anti-korupsi di sektor publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi didirikan pada tahun 1995 sebagai indikator global untuk mengetahui seberapa korupnya sektor publik negara-negara di dunia menurut para ahli dan pebisnis (Transparency

International, 2019). Terdapat 13 data eksternal yang bersumber dari World Bank, The World Economic Forum, Private Risk and Consulting Companies, dan Think Tanks yang digunakan untuk menghitung CPI. Sekitar 180 negara termasuk kedalam daftar CPI. Negara tersebut adalah negara-negara yang termasuk kedalam minimal 3 sumber data CPI agar hasil pengukuran dapat diandalkan. Hasil perhitungan CPI direalisasikan dalam skor atau indeks skala 0 hingga 100. Dimana 0 menandakan sangat korup dan 100 bebas korup. Semakin besar skor atau tinggi indeks maka semakin kecil atau rendahnya korupsi disuatu negara.



Sumber: Corruption Perception Index, 2017

**Gambar 1. Skala CPI**

CPI mengukur tingkat korupsi di dunia kedalam beberapa wilayah dan regional diantaranya Amerika, Asia Pasifik, Eropa Timur dan Asia Tengah, EU dan Eropa Barat, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Sub-Sahara Afrika. Berdasarkan Corruption Perception Index 2017, EU dan Eropa Barat memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu 66 poin, yang menandakan bahwa korupsi di negara-negara pada wilayah tersebut cenderung rendah. Amerika dan Asia Pasifik memiliki rata-rata skor yang sama yaitu 44 poin. Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki skor 38 poin. Eropa Timur dan Asia Tengah memiliki rata-rata skor 34 poin. Sedangkan Sub Sahara Afrika merupakan wilayah dengan skor rata-rata terendah yaitu 33 poin, yang menandakan bahwa korupsi di negara-negara pada wilayah ini cenderung tinggi.



Sumber: Corruption Perception Index, 2017.

**Gambar 2. Tingkat Persepsi Korupsi Sektor Publik di 180 Negara/Wilayah di Seluruh Dunia Tahun 2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Pita Lebar, Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Teknologi

komunikasi (IC) berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima, sedangkan teknologi informasi (TI) berkaitan dengan proses manipulasi data dan mengelola data. Oleh sebab itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain Simarmata, J., et al., (2020). Perkembangan ICT berdampak pada perubahan di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya (Rohmy et al., 2021). Secara umum terdapat dua tipe dampak yang ditimbulkan oleh ICT, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung (Fernández, et, al., 2020). Dampak langsung relatif mengacu pada peningkatan produktivitas yang timbul dan umumnya terjadi secara eksplisit dari pengimplementasian ICT. Sedangkan dampak tidak langsung mewakili materialisasi eksternalitas yang berasal dari penerapan dan pengembangan ICT.

ICT dapat dimanfaatkan secara luas dari waktu ke waktu, seperti pada tahun 1970-an hingga 1990-an pemanfaatan ICT berupa penggunaan telepon dan seluler (*mobile*) lalu diikuti dengan perkembangan internet (Rachmawati, 2018). Internet memiliki beragam keunggulan, diantaranya lebih efisien, tidak terbatas, akses 24 jam, terhubung dengan cepat, tidak perlu izin, dan tidak bersensor (Badruzaman, 2019). Internet juga berdampak positif dalam segi pelayanan (Badruzaman, 2019), seperti *e-commerce*, yaitu aktivitas transaksi perdagangan melalui internet seperti Alibaba dan Amazon. Contoh lainnya *e-banking*, yaitu aktivitas perbankan secara virtual melalui internet. Selain itu *e-learning*, yaitu aktivitas pembelajaran dalam bentuk digital. Bahkan pada pelayanan pemerintahan yang berupa *e-government*, yaitu sistem pelayanan pemerintahan dan informasi kepada masyarakat melalui internet. Perlu diperhatikan bahwa pemanfaatan ICT harus didukung dengan tata lola yang baik. Oleh sebab itu ICT dalam tata kelola harus dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik, menggerakkan masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih baik, menjalin komunikasi antar masyarakat, pemimpin dan kelompok kepentingan, pendidikan kewarganegaraan, dan memberikan pelayanan elektronik.

Sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) merupakan sistem informasi antar organisasi (IOS) untuk transaksi terkait uang yang menghubungkan banyak asosiasi dan klien individu, (Masihuddin et al., 2017). T. H. Shon dan P. M. C. Swatman mengklasifikasikan pembayaran elektronik yang didukung oleh penggunaan internet kedalam empat jenis, diantaranya:

a. *Electronic Cash* (e-Cash)

Penggunaan *electronic cash* (e-cash) atau uang elektronik sama seperti menggunakan uang tunai pada umumnya yaitu alat pembayaran berbasis kertas, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan perantara,

seperti bank atau pihak ketiga lainnya dalam setiap transaksi (Rahadi et al., 2020). Menurut Bank Indonesia terdapat dua unsur yang harus dipenuhi uang elektronik sebagai alat pembayaran. Pertama, nilai uang elektronik disimpan dalam server atau chip. Kedua, nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik bermanfaat dalam mempermudah dan mempercepat transaksi, memberikan keuntungan lain saat bertransaksi, memberikan rasa aman saat membayar, dan meningkatkan efisiensi (Rohmah et al., 2019).

### b. Credit Card

*Credit card* atau kartu kredit merupakan sistem pembayaran yang digunakan dengan meminjam uang untuk transaksi pembelian, transfer saldo, dan mendapatkan uang muka dengan kesepakatan bahwa pengguna akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya (Rahadi et al., 2020). Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang memungkinkan pengguna berhutang untuk membeli barang tertentu saat ini dan membayarnya nanti pada periode pembayaran (Rahadi et al., 2020).

### c. Debit Card

*Debit card* atau kartu debit merupakan sistem pembayaran dimana biaya transaksi diambil langsung dari rekening pemilik (Rahadi et al., 2020). Kartu debit menerapkan sistem saldo seperti tabungan, sehingga untuk melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer atau pembayaran harus memiliki deposit di rekening terlebih dahulu (Rahadi et al., 2020). Dengan demikian kartu debit hanya dapat digunakan selama saldo atau deposit memiliki jumlah yang cukup.

### d. Mobile payment

*Mobile payment* (mpay) adalah pembayaran yang menggunakan perangkat seluler untuk memulai, mengotorisasi, dan mengonfirmasi pertukaran nilai finansial dengan imbalan barang dan jasa (Lu, 2019). Pembayaran dilakukan melalui perangkat nirkabel seperti seluler yang dianggap memberikan kemudahan lebih, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan keamanan pembayaran elektronik, (Bezhovski, 2016). Dengan demikian pemanfaatan sistem pembayaran elektronik terutama mobile payment dapat menjadi alat untuk menurunkan tingkat korupsi, sebab sistem otorisasi yang diterapkan dapat meminimalisir kecurangan.

*E-government* (*electronic government*) mengacu pada pemerintahan yang menggunakan teknologi seperti jaringan area yang luas, internet, dan komputasi seluler untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, atau pemerintahan lainnya (World Bank, 2019). Malodia et al., (2021) dalam penelitiannya menjelaskan evolusi *e-government* menjadi lima tahap yaitu, *information exchange*, *automatic of transactions*, *integration of function*, *adoption research*, dan *service quality*. Tahap pertama, *information exchange* (pertukaran

informasi) berfokus pada penggunaan *Information Communication and Technology* (ICT) pada sistem *e-government*. Tahap kedua, *automatic of transactions* (otomatisasi transaksi) berfokus pada penerapan *e-government* sebagai alat yang menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat. Tahap ketiga, *integration of function* berfokus pada teknologi sebagai media reformasi administrasi publik dan alat untuk meningkatkan kemudahan dalam memberikan layanan pemerintah dan berbagi informasi kepada masyarakat, bisnis, dan antar pemerintah. Tahap keempat yaitu *adoption research*, dan tahap kelima yaitu *service quality*, berfokus pada pengadopsian teknologi dan kualitas layanan *e-government*.

Terdapat empat tipe pelayanan *e-government*, yaitu *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), *Government to Employee* (G2E), *Government to Government* (G2G). G2C merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan dasar seperti perpanjangan izin, pemesanan akta kelahiran/kematian/perkawinan dan pengajuan pajak penghasilan, serta bantuan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Solinthone dan Rummyantseva, 2016). G2B merupakan pertukaran pelayanan yang sektor bisnis dan pemerintah termasuk hal yang berkaitan dengan kebijakan atau regulasi (Solinthone dan Rummyantseva, 2016). G2E merupakan pelayanan yang diberikan untuk pegawai pemerintah seperti penyediaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang meningkatkan fungsi birokrasi sehari-hari dan hubungan dengan warga negara (Solinthone dan Rummyantseva, 2016). Sedangkan G2G merupakan pelayanan yang dapat digunakan dalam tingkat lokal seperti antar pemerintah daerah atau pusat, hingga tingkat internasional sebagai instrumen hubungan internasional atau diplomasi.

*E-government* diimplementasikan dalam berbagai konteks oleh sektor publik untuk memperoleh berbagai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam operasi dan layanan (Bakunzibake et al., 2019). Menurut hasil penelitian Abusamhadana, et al., (2021), implementasi *e-government* dapat mengurangi korupsi, efisiensi pelayanan pemerintah, adanya akses ke layanan pemerintah, dan pengurangan biaya. Abusamhadana, et al., (2021) juga mengungkapkan bahwa dalam pengimplementasian *e-government* akan muncul beberapa halangan seperti kesenjangan digital, tantangan budaya, sabotase pemerintah infrastruktur, gangguan listrik, masalah kepercayaan masyarakat, ancaman keamanan, dan rendahnya pengetahuan publik. Walaupun demikian banyak negara yang berhasil mengimplementasikan *e-government* dengan baik, seperti Denmark, Korea Selatan, dan Estonia yang merupakan tiga negara dengan pembangunan *e-government* terbaik di dunia menurut United Nation E-Government Survey 2020. Menurut hasil penelitian Mensah, (2019) manfaat

yang diterima dari layanan e-government menjadi alasan *e-government* direkomendasikan untuk diimplementasikan sebagai sarana yang lebih baik untuk memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat

Menurut United Nation Office on Drugs and Crime dalam *ICT as a Tool for Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts*, (2020) *Information Communication and Technology (ICT)* adalah alat yang sangat berguna dalam memberantas korupsi. *ICT* dapat mengurangi korupsi dengan berbagi informasi yang dapat mencegah korupsi, melalui otomatisasi dan digitalisasi layanan pemerintahan termasuk platform yang mendukung *blockchain*, dan analisis *big data* (*ICT as a Tool for Citizen Participation in Anti-Corruption Efforts*, 2020). Penelitian Bhattacharjee & Shrivastava, (2018) menunjukkan bahwa TIK mencegah korupsi dengan meningkatkan kepastian dan kecepatan hukuman terkait korupsi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT*) yang kian pesat membuat penggunaannya semakin meluas ke berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Telah banyak negara-negara yang menggunakan dan mengembangkan TIK ke dalam sistem pemerintahan agar dapat mempercepat proses pengintegrasian pada sistem *e-government*. Korea Selatan adalah salah satu contoh negara dengan sistem *e-government* terbaik di dunia berdasarkan *E-Government Survey* oleh United Nation sejak tahun 2005. Menurut *Computerization Promotion Committee South Korea E-Government Special Committee* dalam (E. Lee, 2017), *e-government* ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Sistem *e-government* juga dapat dikembangkan lebih luas sehingga tidak hanya terbatas pada area pemerintahan.

Dari analisis tersebut peneliti membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 1a:** *ICT development* berpengaruh positif terhadap indeks korupsi di negara-negara maju.

**Hipotesis 1b:** *ICT development* berpengaruh positif terhadap korupsi di negara-negara berkembang.

**Hipotesis 2a:** *E-government* memoderasi pengaruh *ICT development* terhadap korupsi di negara maju.

**Hipotesis 2b:** *E-government* memoderasi pengaruh *ICT development* terhadap korupsi di negara berkembang.

Korupsi dapat mudah terjadi apabila terdapat transaksi langsung atau tunai. Oleh sebab itu, untuk mengurangi korupsi diperlukan suatu sistem transaksi yang dapat menghindari transaksi secara langsung. Salah satu alat atau sistem yang dapat digunakan adalah *mobile* (seluler). Teknologi *mobile* dapat berperan penting dalam mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi korupsi, (Ameen, A. A, & Ahmad, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Sassi & Ben Ali, (2017) menunjukkan bahwa teknologi *mobile*

dapat membantu memerangi korupsi sebab mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dan meningkatkan kecepatan penyiaran informasi. Salah satu pemanfaatan *mobile* adalah layanan *mobile payment* yang tidak hanya dapat digunakan secara individual atau perusahaan tertentu, tetapi juga dapat dikembangkan melalui *e-government* khususnya pada sistem P2G (*Person to Government*) atau masyarakat kepada pemerintah. *Mobile payment* memungkinkan masyarakat dan bisnis membayar untuk layanan publik jarak jauh melalui ponsel mereka atau melalui agen uang seluler. Pemerintah yang memfasilitasi transaksi *mobile money* sebagai bagian dari layanan *digital* mereka dapat mengakses lebih luas basis masyarakat dan bisnis. Digitalisasi pembayaran pemerintah akan meningkatkan kemudahan pembayaran bagi pembayar, dan keuangan publik manajemen serta memperkuat transparansi keuangan. Sebab melalui media *digital* seperti seluler jejak aktivitas penggunaannya terekam pada sistem sehingga lebih mudah untuk dideteksi, dan secara tidak langsung dapat menimalisir korupsi. Dari analisis tersebut peneliti membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 3a:** *Mobile payment* berpengaruh positif terhadap indeks korupsi di negara-negara maju.

**Hipotesis 3b:** *Mobile payment* berpengaruh positif terhadap indeks korupsi di negara-negara berkembang.

**Hipotesis 4a:** *E-government* dapat memoderasi pengaruh *mobile payment* terhadap korupsi di negara maju.

**Hipotesis 4a:** *E-government* dapat memoderasi pengaruh *mobile payment* terhadap korupsi di negara berkembang.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan instrument yang valid, dapat diandalkan, dan analisis statistik yang sesuai dan tepat sehingga penelitian memiliki hasil yang tidak menyimpang dari kondisi sesungguhnya (Nurlan, 2019). Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu pengambilan data berdasarkan dokumen tertentu yang dapat berupa laporan, gambar, atau foto. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang terbit di tahun 2017. Data variabel dependen bersumber dari CPI oleh Corruption Perception Index 2017 oleh Transparency International Organization. Data variabel independen MPAY bersumber dari The Global Findex Database 2017 oleh World Bank. Data variabel independen IDI bersumber dari Measuring the Information System Report (MISR) 2017 oleh Information Telecommunication Union (ITU). Data variabel moderator EGDI bersumber dari E-Government Development Index 2018 oleh United Nation. Data variabel kontrol CC bersumber dari Worldwide Governance Indicators 2017 oleh World Bank. Peneliti menggunakan data-data pada

tahun tersebut disebabkan sumber data yang digunakan dalam penelitian tidak terbit setiap tahun.

Objek dari penelitian ini adalah indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi – TIK (IDI), persentase penggunaan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun finansial oleh usia 15 tahun keatas (MPAY), dan indeks persepsi korupsi negara (CPI). Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh negara di dunia yang terdiri dari dua kelompok sampel yaitu 59 negara maju dan 72 negara berkembang, sehingga total sampel adalah 131 negara. Penelitian ini menggunakan Pearson Correlation untuk menguji kualitas instrument penelitian atau menguji model regresi apabila terdapat korelasi antar variabel independen. Eviews merupakan software yang digunakan sebagai alat pengukuran variabel untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan pada Eviews adalah *cross-section* sebab menggunakan data yang terbit beberapa tahun sekali. Tahapan pengujian model data panel dimulai dari analisis regresi. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Apabila hasil regresi telah lolos uji asumsi klasik maka selanjutnya mengintegrasikan model regresi.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sampel dalam penelitian ini adalah negara-negara di seluruh dunia yang memenuhi kriteria seleksi khusus. Negara yang dipilih adalah negara yang menjadi objek penelitian pada lima survei internasional, diantaranya Corruption Perception Index (CPI), ICT Development Index (IDI), The Global Findex Database: *used a mobile phone or the internet to access an account (% age 15+)*, E-Government Development Index (EGDI), dan World Governance Indicators (WGI). Secara keseluruhan data survei yang digunakan adalah data yang terbit pada tahun 2017. Pengecualian untuk data variabel EGDI yang menggunakan tahun 2018, sebab survei diadakan dalam 2 tahun sekali dan terbit di tahun genap. Hasil seleksi sampel akan dikelompokkan menjadi 2 yaitu negara maju dan berkembang. Pengelompokkan tersebut berdasarkan Human Development Index 2017 dengan kriteria apabila HDI 0.80 untuk kelompok negara maju, dan apabila < 0.80 untuk kelompok negara berkembang. Dari hasil seleksi diperoleh sampel akhir sebanyak 131 negara dengan 59 sampel negara maju dan 72 sampel negara berkembang.

**Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel**

Pemilihan Sampel	
Populasi negara diseluruh dunia	241
Corruption Perception Index	(67)
ICT Development Index	(1)
Used a mobile phone or the internet to access an account (% age 15+)	(1)
E-Government Development Index	(0)
Control of Corruption	(0)
Jumlah Sampel	131
Sampel Negara Maju	59
Sampel Negara Berkembang	72

Sumber: Peneliti, 2022

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel dependen dan independen, serta variabel moderasi dan variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel dependen yaitu *corruption* yang di notasikan dengan CPI (Corruption Perception Index), variabel independen yaitu *mobile payment* yang dinotasikan dengan MPAY dan *ICT development* yang dinotasikan dengan IDI, variabel moderasi yaitu e-government yang dinotasikan dengan EGDI dan variabel kontrol yaitu *control of corruption* yang dinotasikan dengan CC. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Tanpa Variabel Moderasi**

	Negara Maju				Negara Berkembang			
	CPI	IDI	MPAY	CC	CPI	IDI	MPAY	CC
Mean	0.5932	0.7225	0.3865	0.1330	0.3304	0.3735	0.1730	0.1395
Median	0.5800	0.7240	0.3320	0.1300	0.3200	0.3385	0.1035	0.0490
Max	0.8900	0.8980	0.8510	0.2600	0.6100	0.6450	0.7580	0.4000
Min	0.2800	0.2260	0.0270	0.1100	0.1500	0.1050	0.0040	0.1100
Std. Dev.	0.1794	0.1218	0.2234	0.0219	0.0886	0.1499	0.1633	0.0383

CPI= Corruption Perception Index (indeks korupsi), IDI= ICT Development Index (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= Mobile Payment (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), CC= Control of Corruption (pengendalian korupsi negara).

Sumber: Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai standar deviasi (Std. Dev) variabel independen dan dependen lebih rendah daripada nilai rata-rata (*mean*), sehingga hasil analisis bersifat homogen dan rata-rata semua variabel memiliki tingkat penyimpangan yang rendah. Pada sampel negara maju, variabel dependen CPI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5931 dan standar deviasi 0.1794. Hal ini menggambarkan indeks korupsi di negara maju sebesar 59 dengan persebaran data sebesar 18. Indeks korupsi terendah (minimum) di negara maju sebesar 0.2800 atau 28 dan indeks korupsi tertinggi (maksimum) 0.8900 atau 89, serta nilai tengah (median) sebesar 0.5800 di tahun 2017. Nilai tersebut menunjukkan dari skala 0-100 menurut Corruption Perception Index, indeks korupsi tertinggi adalah 89 yaitu negara New Zealand di tahun 2017. Semakin tinggi indeks korupsi semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut. Variabel independen IDI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.7225 dan standar deviasi sebesar 0.1218. Hal ini menggambarkan ICT Development atau pengembangan TI di negara maju sebesar 72% dengan persebaran data sebesar 12%. ICT Development terendah (minimum) sebesar 0.2260

atau 23% dan tertinggi (maksimum) 0.8980 atau 90%, serta nilai tengah (median) 0.7240 di tahun 2017.

Variabel independen MPAY memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3865 dan standar deviasi sebesar 0.2234. Hal ini menggambarkan tingkat penggunaan *mobile payment* atau telepon seluler untuk transaksi pembayaran di negara maju sebesar 38% dengan persebaran data sebesar 22%. Tingkat penggunaan *mobile payment* (minimum) sebesar 0.0270 atau 3% dan tertinggi (maksimum) 0.8510 atau 85%, serta nilai tengah (median) 0.3220 di tahun 2017. Variabel kontrol CC memiliki nilai rata-rata 0.1330 dan standar deviasi 0.0219. Hal ini menggambarkan tingkat *Control of Corruption* atau pengendalian korupsi di negara maju sebesar 13% dengan persebaran data sebesar 3%. Tingkat *Control of Corruption* terendah (minimum) sebesar 0.1100 atau 11% dan tertinggi (maksimum) 0.2600 atau 26%, serta nilai tengah (median) 1300 di tahun 2017.

Pada sampel negara berkembang, variabel dependen CPI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3304 dan standar deviasi sebesar 0.0886. Hal ini menggambarkan indeks korupsi di negara berkembang sebesar 33 dengan persebaran data sebesar 9. Indeks korupsi terendah (minimum) sebesar 0.1500 atau 15 dan indeks korupsi tertinggi (maksimum) sebesar 0.6100 atau 61, serta nilai tengah sebesar (median) 3200 di tahun 2017. Nilai tersebut menunjukkan dari skala 0-100 menurut *Corruption Perception Index*, indeks korupsi terendah adalah 15 yaitu negara Afghanistan di tahun 2017. Semakin rendah indeks korupsi semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Variabel independen IDI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3734 dan standar deviasi sebesar 0.0778. Hal ini menggambarkan *ICT Development* atau pengembangan TI di negara maju sebesar 72 dengan persebaran data sebesar 12. *ICT Development* terendah (minimum) sebesar 0.1050 atau 11% dan tertinggi (maksimum) sebesar 0.6450 atau 65%, serta nilai tengah (median) sebesar 0.3328 di tahun 2017.

Variabel independen MPAY memiliki nilai rata-rata sebesar 0.1729 dan standar deviasi sebesar 0.1633. Hal ini menggambarkan tingkat penggunaan telepon seluler untuk transaksi pembayaran di negara berkembang sebesar 17% dengan persebaran data sebesar 16%. Tingkat penggunaan *mobile payment* (minimum) sebesar 0.0040 atau 0,4% dan tertinggi (maksimum) sebesar 0.7580 atau 76%, serta nilai tengah (median) 0.1035 di tahun 2017. Variabel kontrol CC memiliki nilai rata-rata 0.1395 dan standar deviasi 0.0383. Hal ini menggambarkan tingkat *Control of Corruption* atau pengendalian korupsi di negara berkembang sebesar 14% dengan persebaran data sebesar 4%. Tingkat *Control of Corruption* terendah (minimum) sebesar 0.1100 atau 11 dan tertinggi (maksimum) sebesar 0.2600 atau 26% di tahun 2017. Tingkat *Control of Corruption* terendah (minimum) sebesar 0.1100 atau 11% dan

tertinggi (maksimum) sebesar 0.4000 atau 40%, serta nilai tengah (*median*) sebesar 0.0490 di tahun 2017.

**Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif dengan Variabel Moderasi**

	Negara Maju				Negara Berkembang			
	CPI	IDI* EGDI	MPAY* EGDI	CC	CPI	IDI* EGDI	MPAY* EGDI	CC
Mean	0.5932	0.5718	0.3142	0.1330	0.3304	0.1946	0.0776	0.1395
Median	0.5800	0.5730	0.2650	0.1300	0.3200	0.1745	0.0490	0.1300
Max	0.8900	0.8090	0.7590	0.2600	0.6100	0.4490	0.3600	0.4000
Min	0.2800	0.0520	0.0060	0.1100	0.1500	0.0160	0.0010	0.1100
Std. Dev.	0.1794	0.1500	0.2028	0.0219	0.0886	0.1193	0.0778	0.0383

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), EGDI= *E-Government* (indeks sistem pemerintahan elektronik negara), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara).IDI\*EGDI= *ICT Development Index* dengan moderasi E-Government, MPAY\*EGDI= *Mobile Payment Index* dengan moderasi E-Government.

Sumber: Peneliti, 2022

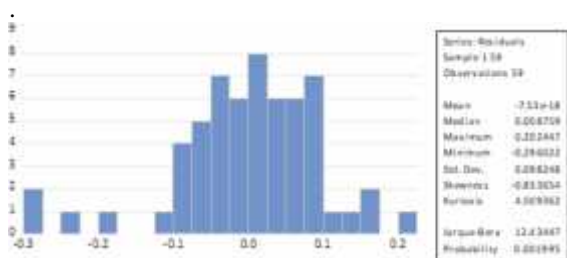
Berdasarkan tabel 3 diketahui standar deviasi (Std. Dev) variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata (mean), sehingga hasil analisis deskriptif bersifat homogen dan rata-rata semua variabel memiliki tingkat penyimpangan yang rendah. Terkecuali variabel MPAY\*EGDI yang memiliki standar deviasi yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata, namun tingkat penyimpangannya tidak terlalu tinggi. Pada negara maju, variabel independen dan variabel moderator IDI\*EGDI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5718 dan standar deviasi 0.1500. Hal ini menggambarkan *e-government* dapat memperkuat pengaruh *ICT development* terhadap indeks korupsi di negara maju sebesar 57% dengan tingkat persebaran data sebesar 15%. Nilai IDI yang dimoderasi EGDI terendah (minimum) di negara maju sebesar 0.0520 atau 5% dan nilai tertinggi (maksimum) 0.8090 atau 81%, serta nilai tengah (median) sebesar 0.5730. Variabel independen MPAY dan variabel moderator EGDI memiliki rata-rata sebesar 0.3142 dan standar deviasi 0.2028. Hal ini menggambarkan *e-government* dapat memperkuat pengaruh *mobile payment* terhadap indeks korupsi di negara maju sebesar 31% dengan standar deviasi sebesar 20%. Nilai MPAY yang dimoderasi EGDI terendah (minimum) di negara maju sebesar 0.0060 atau 0.06% dan nilai tertinggi (maksimum) 0.7590 atau 76%, serta nilai tengah (median) sebesar 0.2650.

Pada negara berkembang, variabel independen dan variabel moderator IDI\*EGDI memiliki nilai rata-rata sebesar 0.1946 dan standar deviasi 0.1193. Hal ini menggambarkan *e-government* dapat memperkuat pengaruh *ICT development* terhadap indeks korupsi di negara berkembang sebesar 19% dengan tingkat persebaran data sebesar 12%. Nilai IDI yang dimoderasi EGDI terendah (minimum) di negara berkembang sebesar 0.0160 atau 0.02% dan nilai tertinggi (maksimum) 0.4490 atau 45%, serta nilai tengah (median) sebesar 0.1745. Variabel independen MPAY dan variabel moderator EGDI memiliki rata-rata sebesar 0.0776



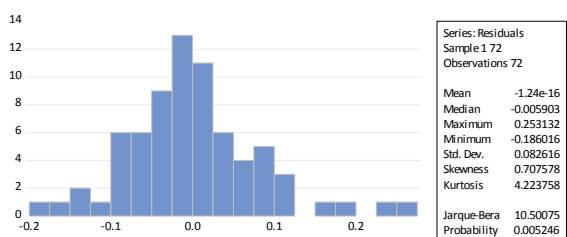
dan standar deviasi 0.0778. Hal ini menggambarkan menggambarkan *e-government* dapat memperkuat pengaruh *mobile payment* terhadap indeks korupsi di negara berkembang sebesar 8% dengan standar deviasi sebesar 8%. Nilai MPAY yang dimoderasi EGDI terendah (minimum) di negara berkembang sebesar 0.0010 atau 0.01% dan nilai tertinggi (maksimum) 0.3600 atau 36%, serta nilai tengah (median) sebesar 0.0490.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan statistik analisis linear regresi berganda dengan dasar ordinary least square (OLS). Variabel dependen yaitu corruption yang di notasikan dengan CPI (Corruption Perception Index), variabel independen yaitu *mobile payment* yang dinotasikan dengan MPAY dan ICT development yang dinotasikan dengan IDI, variabel moderasi yaitu *e-government* yang dinotasikan dengan EGDI dan variabel kontrol yaitu *control of corruption* yang dinotasikan dengan CC. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada berikut.



Sumber: Peneliti, 2022

Gambar 3. Uji Normalitas Negara Maju



Sumber: Peneliti, 2022

Gambar 4. Uji Normalitas Negara Berkembang

Hasil uji normalitas negara maju dan negara berkembang dengan variabel moderasi pada Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0.05, yaitu negara maju sebesar 0.0063 dan negara berkembang sebesar 0.0019. Hasil tersebut menandakan bahwa baik data negara maju ataupun negara berkembang tidak berdistribusi normal. Namun berdasarkan teori pengambilan sampling Teorema Limit Sentral (*Central Limit Theorem*) kurva distribusi sampling untuk ukuran sampel 30 atau lebih akan berpusat pada nilai

parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Diketahui sampel negara maju adalah 59 negara dan sampel negara berkembang 72 negara. Dengan demikian kedua sampel tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. Pearson Correlation Tanpa Variabel Moderasi

	Negara Maju			Negara Berkembang		
	IDI	MPAY	CC	IDI	MPAY	CC
IDI	1	0.6690	-0.0876	1	-0.1775	-0.1103
MPAY	0.6690	1	-0.1429	-0.1775	1	-0.1148
CC	-0.0876	-0.1429	1	-0.1103	-0.1148	1

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara).

Sumber: Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4 diketahui hubungan antar variabel independen IDI dan MPAY memiliki nilai kurang dari 0.80, yaitu pada negara maju sebesar 0.67 dan pada negara berkembang sebesar -0.18. Hubungan variabel independen IDI dan variabel kontrol CC memiliki nilai kurang dari 0.80 yaitu pada negara maju sebesar -0.09, dan pada negara berkembang sebesar -0.11. Hubungan variabel independen MPAY dan variabel kontrol CC memiliki nilai kurang dari 0.80, yaitu pada negara maju sebesar -0.14 dan pada negara berkembang sebesar -0.11. Hal ini mengindikasikan tidak ditemukannya masalah multikolinieritas pada kedua kelompok sampel.

Tabel 5. Pearson Correlation dengan Variabel Moderasi

	Negara Maju			Negara Berkembang		
	IDI*EGDI	MPAY*EGDI	CC	IDI*EGDI	MPAY*EGDI	CC
IDI*EGDI	1	0.7235	-0.09	1	0.0724	-0.0847
MPAY*EGDI	0.7235	1	-0.11	0.0724	1	-0.1326
CC	-0.09	-0.11	1	-0.0847	-0.1326	1

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), EGDI= *E-Government* (indeks sistem pemerintahan elektronik negara), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara). IDI\*EGDI= *ICT Development Index* dengan moderasi *E-Government*, MPAY\*EGDI= *Mobile Payment* dengan moderasi *E-Government*.

Sumber: Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 5 diketahui hubungan antar variabel independen dengan variabel moderator IDI\*EGDI dan MPAY\*EGDI kurang dari 0.80, yaitu pada negara maju sebesar 0.72 dan pada negara berkembang sebesar 0.07. Hubungan variabel independen IDI dan variabel kontrol CC memiliki nilai kurang dari 0.80 yaitu pada negara maju sebesar -0.09, dan pada negara berkembang sebesar -0.11. Hubungan variabel independen MPAY dan variabel kontrol CC memiliki nilai kurang dari 0.80, yaitu pada negara maju sebesar -0.14 dan pada negara berkembang sebesar -0.11. Hal ini mengindikasikan tidak ditemukannya masalah multikolinieritas pada kedua kelompok sampel.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Tanpa Variabel Moderasi

	Negara Maju	Negara Berkembang		Negara Maju	Negara Berkembang
F-Statistic	1.8032	0.9277	Prob. F (9,49)	0.1048	0.0855
Obs*R squared	14.9369	4.7270	Prob. Chi-Square (9)	0.1122	0.0927
Scaled explained SS	16.0504	6.8144	Prob. Chi-Square (9)	0.0592	0.0124

Sumber: *Peneliti, 2022*

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai Obs\*R-Squared memiliki nilai probabilitas Chi-Square lebih dari 0.05 yaitu nilai p pada negara maju sebesar 0.11, dan pada negara berkembang sebesar 0.09. Hasil pengujian menunjukkan nilai p yang tidak signifikan sehingga H1 diterima atau tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model kedua kelompok sampel.

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas dengan Variabel Moderasi**

	Negara Maju	Negara Berkembang		Negara Maju	Negara Berkembang
F-Statistic	1.3197	1.3180	Prob. F (9,8)	0.2514	0.2673
Obs*R squared	11.5110	6.5364	Prob. Chi-Square (9)	0.2423	0.2575
Scaled explained SS	17.0487	9.5753	Prob. Chi-Square (9)	0.0480	0.0882

Sumber: *Peneliti, 2022*

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai Obs\*R-Squared memiliki nilai probabilitas Chi-Square lebih dari 0.05 yaitu nilai p pada negara maju sebesar 0.24, dan pada negara berkembang sebesar 0.25. Hasil pengujian menunjukkan nilai p yang tidak signifikan sehingga H1 diterima atau tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model kedua kelompok sampel.

**Tabel 8. Interpretasi Hasil Regresi Tanpa Variabel Moderasi**

Variable	Negara Maju		Negara Berkembang	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	-0.0815	0.5292	0.2498	0.0000
IDI	0.6995	0.0000*	0.1970	0.0056*
MPAY	0.3395	0.0002*	0.0848	0.1843**
CC	0.2864	0.6580	-0.2673	0.8383
Adjusted R-squared (R <sup>2</sup> )	0.6489		0.0815	
S.E of regression	0.1063		0.0849	
F-statistic	36.7347		3.1009	
Prob(F-statistic)	0.0000		0.0323	

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara), IDI\*EGDI= *ICT Development Index* dengan moderasi *E-Government*, MPAY\*EGDI= *Mobile Payment Index* dengan moderasi *E-Government*, alfa = 5% atau 0.05, \*= prob.< alfa maka berpengaruh signifikan, \*\*= Prob. > alfa maka tidak berpengaruh signifikan

Sumber: *Peneliti, 2022*

**a. Koefisien determinasi**

Tabel 8 menunjukkan besarnya adjusted R2 pada negara maju sebesar 0.6489. Hal ini berarti 65% variasi indeks korupsi (CPI) di negara maju dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengembangan IT (IDI), variasi mobile payment (MPAY), dan pengendalian korupsi (CC). Sedangkan sisanya yaitu 35% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. Adjusted R2 pada negara berkembang sebesar 0.0815. Hal ini berarti dan 8.2% variasi indeks korupsi di negara berkembang dapat dijelaskan oleh variasi pembayaran variasi tingkat pengembangan IT (IDI), (MPAY), dan pengendalian korupsi (CC). Sedangkan sisanya yaitu 91.8% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model.

**b. Uji Statistik F**

Tabel 8 menunjukkan F hitung pada negara maju sebesar 36.7347 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Disebabkan nilai probabilitas variabel IDI, MPAY, dan CC lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel IDI, MPAY, dan CC tidak sama dengan nol atau seluruh variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap CPI. Dengan demikian nilai koefisien determinasi R2 signifikan.

**c. Uji Statistik t**

Hasil model regresi pada tabel 8 diketahui bahwa pada kelompok sampel negara maju variabel independen IDI dan MPAY signifikan sebab nilai probabilitas kedua variabel tersebut kurang dari 0.05, yaitu 0.00. Sedangkan variabel kontrol CC tidak signifikan sebab nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 yaitu 0.66. Pada kelompok sampel negara berkembang, variabel independen IDI signifikan sebab nilai probabilitas lebih dari 0.05 yaitu 0.01. Sedangkan variabel independen MPAY dan variabel kontrol CC tidak signifikan sebab nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 yaitu 0.18 dan 0.83. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel CPI dipengaruhi oleh variabel IDI. Sedangkan variabel CPI dapat dipengaruhi oleh variabel IDI hanya pada negara maju.

**Tabel 9. Interpretasi Hasil Regresi dengan Variabel Moderasi**

Variable	Negara Maju		Negara Berkembang	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	0.1226	0.2311	0.2918	0.0000
IDI*EGDI	0.3448	0.0000*	0.2062	0.0191*
MPAY*EGDI	0.6023	0.0011*	0.1406	0.2918**
CC	0.1342	0.8273	-0.0891	0.7415
Adjusted R-squared (R <sup>2</sup> )	0.6807		0.0621	
S.E of regression	0.1014		0.0858	
F-statistic	44.2253		2.5681	
Prob(F-statistic)	0.0000		0.0615	

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), EGDI= *E-Government* (indeks sistem pemerintahan elektronik negara), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara), IDI\*EGDI= *ICT Development Index* dengan moderasi *E-Government*, MPAY\*EGDI= *Mobile Payment Index* dengan moderasi *E-Government*, alfa = 5% atau 0.05, \*= prob.< alfa maka berpengaruh signifikan, \*\*= Prob. > alfa maka tidak berpengaruh signifikan

Sumber: *Peneliti, 2022*

**a. Koefisien determinasi**

Tabel 9 menunjukkan besarnya adjusted R2 pada negara maju sebesar 0.6807, hal ini berarti 68% variasi indeks korupsi (CPI) dapat dijelaskan oleh variasi pembayaran seluler dengan sistem e-government (MPAY\*EGDI), variasi tingkat pengembangan IT dengan sistem e-government (IDI\*EGDI), dan pengendalian korupsi (CC). Sedangkan sisanya yaitu 32% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. Adjusted R2 pada negara berkembang sebesar 0.0621, hal ini berarti 62% variasi indeks korupsi (CPI) dapat dijelaskan oleh variasi pembayaran seluler dengan sistem e-government (MPAY\*EGDI), variasi tingkat pengembangan IT dengan siste, e-government (IDI\*EGDI), dan pengendalian korupsi (CC).

Sedangkan sisanya yaitu 38% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model.

b. Uji Statistik F

Tabel 9 pada negara maju menunjukkan F hitung sebesar 44.2253 dengan probabilitas sebesar 0.00. Disebabkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi IDI\*EGDI, MPAY\*EGDI, dan CC tidak sama dengan nol atau ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap CPI. Dengan demikian nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> tidak sa,a dengan nol atau signifikan. Pada negara berkembang, F hitung memiliki nilai sebesar 2.5681 dengan nilai probablitas sebesar 0.0615. Disebabkan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi IDI\*EGDI, MPAY\*EGDI, dan CC secara simultan tidak berpengaruh terhadap CPI

c. Uji Statistik t

Hasil model regresi pada tabel 9 diketahui bahwa pada negara maju variabel independen dengan variabel moderator IDI\*EGDI dan MPAY\*EGDI signifikan sebab nilai probabilitas kedua variabel tersebut kurang dari 0.05, yaitu 0.00. Sedangkan variabel kontrol CC tidak signifikan sebab nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 yaitu 0.82. Pada negara berkembang, variabel independen MPAY signifikan sebab nilai probabilitas lebih dari 0.05 yaitu 0.01. Sedangkan variabel independen IDI dan variabel kontrol CC tidak signifikan sebab nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 yaitu 0.29 dan 0.74. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik pada negara maju atau negara berkembang pada variabel CPI dipengaruhi oleh variabel IDI. Sedangkan variabel CPI dapat dipengaruhi oleh variabel IDI hanya pada negara maju.

Pada model regresi ini pengujian pertama dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan sistem pembayaran seluler dan IT yang dimoderasi oleh sistem *e-government* terhadap indeks korupsi di negara maju dan negara berkembang. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9.

**Tabel 10. Hasil Regresi Model Tanpa Variabel Moderasi**

Variable	Negara Maju			Negara Berkembang		
	Prediksi	Coefficient	Prob.	Prediksi	Coefficient	Prob.
C		-0.0815	0.5292		0.2498	0.0000
IDI	+	0.6995	0.0000*	+	0.1970	0.0056*
MPAY	+	0.3395	0.0002*	+	0.0848	0.1843**
CC	+	0.2864	0.6580	+	-0.2673	0.8383
Adjusted R-squared (R <sup>2</sup> )		0.6489			0.0815	
S.E of regression		0.1063			0.0849	
F-statistic		36.7347			3.1009	
Prob(F-statistic)		0.0000			0.0323	

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), CC= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara), alfa = 5% atau 0.05, \* = prob.< alfa maka berpengaruh signifikan, \*\* = Prob. > alfa maka tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 10 diketahui pada kelompok sampel negara maju, variabel pengembangan TI atau *ICT development* memiliki probabilitas lebih kecil dari alpha 5% yaitu sebesar 0.00. Hal ini mengindikasikan *ICT Development* yang dinotasikan dengan IDI berpengaruh signifikan terhadap indeks korupsi yang dinotasikan dengan CPI di negara maju sehingga hipotesis 1a diterima. Demikian pula pada kelompok sampel negara berkembang dimana variabel IDI memiliki probabilitas lebih kecil dari alpha 5% yaitu sebesar 0.0056. Hal ini mengindikasikan pengembangan TI berpengaruh signifikan terhadap korupsi di negara berkembang sehingga hipotesis 1b diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adam, I & Fazekas, (2018). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa TIK memiliki pengaruh terhadap pekerjaan semua pihak yang terlibat atau melawan korupsi diantaranya lembaga publik. organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media.

Variabel pembayaran melalui telepon seluler atau *mobile payment* di negara maju memiliki probabilitas lebih kecil dari alpha 5% yaitu sebesar 0.0002. Hal ini mengindikasikan *mobile payment* yang dinotasikan dengan MPAY berpengaruh signifikan terhadap indeks korupsi yang dinotasikan dengan CPI di negara maju sehingga hipotesis 3a diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Barasa, (2021). Dalam hasil penelitian tersebut penggunaan uang seluler dalam pembayaran dapat secara efektif mengurangi korupsi khususnya korupsi kecil. Demikian pada penelitian Sapitri, (2021) yang menyatakan pembayaran non-tunai memiliki hubungan mengarah ke positif di Indonesia dimana semakin tinggi pembayaran non-tunai semakin mengurangi tingkat korupsi. Sedangkan di negara berkembang, variabel MPAY memiliki probabilitas lebih besar dari alpha 5% yaitu sebesar 0.1843. Hal ini mengindikasikan *mobile payment* tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di negara berkembang sehingga hipotesis 3b ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tang & Kong, (2021) menyatakan adopsi pembayaran seluler dapat meningkatkan korupsi khususnya dalam jangka pendek. Penelitian lainnya yaitu Low, et. al, (2020) dengan subjek negara Malaysia, Thailand, dan Singapore menunjukkan hasil bahwa kebijakan pembayaran non-tunai tidak mempengaruhi dan tidak dapat mengendalikan korupsi.

**Tabel 11. Hasil Regresi Model dengan Variabel Moderasi**

Variable	Negara Maju			Negara Berkembang		
	Prediksi	Coefficient	Prob.	Prediksi	Coefficient	Prob.
C		0.1226	0.2311		0.2918	0.0000
IDI*EGDI	+	0.3448	0.0000	+	0.2062	0.0191
MPAY*EGDI	+	0.6023	0.0011	+	0.1406	0.2918
CC	+	0.1342	0.8273	+	-0.0891	0.7415
Adjusted R-squared (R <sup>2</sup> )		0.6807			0.0621	
S.E of regression		0.1014			0.0858	
F-statistic		44.2253			2.5681	
Prob(F-statistic)		0.0000			0.0615	

CPI= *Corruption Perception Index* (indeks korupsi), IDI= *ICT Development Index* (indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, MPAY= *Mobile Payment* (proporsi negara yang menggunakan telepon seluler atau internet untuk mengakses akun keuangan dengan usia >15 tahun), *EGDI*= *E-Government* (indeks sistem pemerintahan elektronik negara), *CC*= *Control of Corruption* (pengendalian korupsi negara).IDI\*EGDI= *ICT Development Index* dengan moderasi *E-Government*, MPAY\*EGDI= *Mobile Payment Index* dengan moderasi *E-Government*., alfa = 5% atau 0.05, \*= prob.< alfa maka berpengaruh signifikan, \*\*= Prob. > alfa maka tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 11 diketahui pada kelompok sampel negara maju, variabel pengembangan TI atau *ICT development* yang dimoderasi dengan variabel sistem *e-government* memiliki probabilitas lebih kecil dari alpha 5% yaitu sebesar 0.0000. Hal ini mengindikasikan pengembangan TI dengan notasi IDI yang dimoderasi sistem *e-government* dengan notasi EGDI berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi yang dinotasikan dengan CPI di negara maju. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 2a yang menyatakan *ICT Development* yang dimoderasi oleh *e-government* dapat memperlemah korupsi di negara maju. Melemahnya korupsi akan berdampak meningkatnya indeks korupsi disuatu negara. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam, Ibrahim & Alhassan, (2020) yaitu ICT dalam e-government berdampak positif terhadap korupsi. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Lee, (2017), yaitu perkembangan TIK telah mempercepat munculnya sistem *e-government* untuk tuntutan transparansi yang lebih tinggi sehingga diharapkan berdampak positif dalam menurunkan korupsi. Sedangkan hipotesis 2b yang menyatakan *ICT Development* yang dimoderasi oleh *e-government* dapat memperlemah korupsi di negara berkembang ditolak. Penyebabnya yaitu variabel pengembangan TI (IDI) yang dimoderasi dengan sistem *e-government* (EGDI) memiliki probabilitas lebih besar dari alpha 5% yaitu sebesar 0.1843. Hal tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dari *ICT development* dengan moderasi dari *e-government* negara berkembang.

Variabel pembayaran melalui telepon seluler atau *mobile payment* dengan notasi MPAY yang dimoderasi dengan variabel *e-government* pada kelompok sampel negara maju memiliki probabilitas lebih kecil dari alpha 5% yaitu sebesar 0.0011. Hal ini mengindikasikan pembayaran melalui telepon seluler dengan notasi MPAY yang dimoderasi dengan sistem *e-government* dengan notasi EGDI berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di negara maju. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 4a sehingga hipotesis 4a diterima. Sedangkan pada kelompok sampel negara berkembang, variabel pembayaran seluler yang dimoderasi dengan sistem *e-government* memiliki probabilitas lebih besar dari alpha 5% yaitu sebesar 0.2918. Hal ini

mengindikasikan pembayaran melalui telepon seluler yang dimoderasi dengan sistem *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di negara berkembang sehingga hipotesis 4b ditolak. Hasil hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Kurniati & Nugroho, (2019) mengenai sistem pembayaran non-tunai dalam pemerintahan Indonesia dimana pembayaran non-tunai memiliki hubungan yang mengarah ke arah positif terhadap korupsi. Seperti yang dinyatakan dalam penelitiannya yaitu semakin tinggi tingkat pembayaran non-tunai, maka semakin memperlemah korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok negara maju, variabel kontrol yaitu *Control of Corruption* yang dinotasikan dengan CC tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks korupsi. Penyebabnya yaitu nilai probabilitas CC lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.8273. Hal ini kemungkinan menandakan *Control of Corruption* dapat mengurangi korupsi tetapi tidak sampai ke level terendah. Sama halnya pada kelompok negara berkembang, *Control of Corruption* tidak berpengaruh signifikan terhadap corruption, sebab memiliki probabilitas lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.7415. Berdasarkan data statistik deskriptif hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan menunjukkan bahwa mayoritas negara sampel tidak terkendala dalam penurunan korupsi yang dipengaruhi oleh pengendalian korupsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Belgibayeva, A., & Plekhanov, (2015) pengendalian korupsi yang tinggi akan membuat biaya suap semakin mahal. Hal tersebut dapat mengurangi korupsi sehingga memungkinkan indeks korupsi suatu negara untuk meningkat. Sejalan dengan penelitian Asongu, (2013) yang menyatakan ketika pengendalian korupsi ditanggapi serius oleh pemegang kekuasaan maka dapat membantu dalam mengurangi korupsi.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi dan analisis sebelumnya dapat disimpulkan:

1. *ICT Development* memiliki pengaruh signifikan terhadap *corruption* baik pada kelompok negara maju maupun negara berkembang. Hal ini berarti semakin tinggi pengembangan TIK maka semakin tinggi indeks korupsi yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Demikian pula ketika *e-government* memoderasi *ICT development* kedua kelompok sampel yaitu negara maju dan negara berkembang memiliki pengaruh positif dalam menurunkan potensi korupsi.
2. *Mobile payment* memiliki pengaruh signifikan terhadap *corruption* pada kelompok negara maju. Sedangkan pada

kelompok negara berkembang *mobile payment* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *corruption*. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penggunaan *mobile payment* maka semakin tinggi indeks korupsi yang terjadi baik di negara maju namun tidak di negara berkembang. Demikian pula ketika *e-government* memoderasi *mobile payment*, pada kelompok sampel negara maju *mobile payment* memiliki pengaruh positif dalam menurunkan potensi korupsi. Sedangkan pada kelompok sampel negara berkembang *mobile payment* tidak memiliki pengaruh positif.

## 5.2. Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada korupsi di negara maju dan berkembang dari perspektif sektor publik, sebab adanya keterbatasan untuk memperoleh sumber data dari sektor swasta. Hal ini berdampak pada hasil penelitian yang kurang mewakili perbandingan dampak penggunaan telepon seluler pada sektor publik dan sektor swasta. Selain itu penelitian ini menggunakan metode *cross-section* dengan periode waktu satu tahun yaitu tahun 2017. Tahun tersebut dipilih sebab sumber data variabel yang digunakan tidak terbit secara tahunan dan data variabel independen MPAY menyajikan data paling lengkap hanya di tahun 2017. Variabel moderasi EGD menggunakan sumber data yang terbit di tahun 2018. Hal ini disebabkan data yang bersumber dari E-Government Development Index hanya terbit dua tahun sekali dimana hasil olah data di tahun 2017 diterbitkan di tahun 2018. Kurang lengkapnya jumlah data dari setiap negara juga berdampak pada sedikitnya jumlah sampel yang diperoleh. Oleh sebab itu penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya melihat dari perspektif sektor publik, tetapi juga dari perspektif sektor swasta sehingga dapat membandingkan pengaruh *ICT development*, *mobile payment*, dan moderasi *e-government* terhadap indeks korupsi dari dua sektor yang berbeda. Selain itu sebaiknya peneliti berikutnya dapat memperluas sampel dengan menambah jumlah tahun data yang digunakan serta menambah daftar negara yang dijadikan sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

Abusamhadana, GAO, Bakon KA, & Elias NF (2021) " E-Government in Ghana: The Benefits and Challenges." *Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia*, 10(1), 124-140. Adam, I., & Fazekas, M. (2018). Are Emerging Technologies Helping Win the Fight Against Corruption in Developing Countries. *Pathways for Prosperity Commission Background Paper Series*, (21). Alderete, M. V. (2018). The mediating role of ICT in the development of open government.

*Journal of Global Information Technology Management*, 1–16. doi:10.1080/1097198x.2018.1498273.

- Adam, I. O. (2020). Examining E-government development effects on corruption in Africa: the mediating effects of ICT development and institutional quality. *Technology in Society*, 61, 101245.
- Adam, Ibrahim & Alhassan, Muftawu Dzag. (2020). The Linkages between ICT Access, E-government and Government Effectiveness and its Effect on Corruption. *International Journal of Technology Policy and Management*. 10.1504/IJTPM.2021.10043458.
- Ameen, A. A., Ahmad, K. (2016). Information Systems Strategies to Reduce Financial Corruption. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 731–740. doi:10.1007/978-3-319-43434-6\_65.
- Asongu, S. A. (2013). Fighting Corruption in Africa: Do Existing Corruption Control Levels Matter? *International Journal of Development*. Issues, 12(1), 36–52.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 135-152.
- Bajpai, Rajn., Myers, C. Bernard. *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption* (English). Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption>. Diakses pada Februari 2022.
- Barasa, Laura. (2021). Mobile Money Payment: An Antidote to Petty Corruption? *African Economic Research Consortium*.
- Beutin, Nikolas., Maximilian Harmsen. (2019). *Mobile payment Report 2019*. PwC. Dikutip dari: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/pwc-studie-mobile-payment-2019.pdf>
- Belgibayeva, A., & Plekhanov, A. (2015). Does Corruption Matter for Sources of Foreign Direct Investment? *EBRD Working Paper*, No. 176.
- Boku. (2021). *Mobile Wallet Payment Report 2021*. Demirguc-Kunt, Asli., Klapper, Leora., Singer, Dorothe., Ansar, Saniya., Hess, Jake Richard. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution* (English). Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/The-Global-Findex-Database-2017-Measuring->

- Financial-Inclusion-and-the-Fintech-Revolution.*
- Capgemini., BNP Paribas. (2017). World Payment Report 2017.
- Evans, O. (2018). Digital government: ICT and publik sector management in Africa. Munich Personal RePEc Archive.
- Farooqi, Z., Yaseen, M. R., Anwar, S., & Makhdom, M. S. A. (2020). Determinants of information and communication technology (ICT) adoption in developing countries. *Indian Journal of Science and Technology*, 13(39), 4116-4126.
- Fernández-Portillo, A., Almodóvar-González, M., & Hernández-Mogollón, R. (2020). Impact of ICT development on economic growth. A study of OECD European union countries. *Technology in Society*, 63, 101420.
- Fichers, Nicholas., Lamia Naji. (2020). Digitalising Person to Government Payments. GSMA Associate.
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Tren penindakan kasus korupsi pada 2017. Dikutip dari: <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017>. Di akses pada: 1 Desember 2021.
- International Monetary Fund. (2018). Dikutip dari: <https://www.imf.org/en/Data>. Di akses pada November 2021.
- Internet World Stats. Usage and population statistics. Dikutip dari: <https://www.internetworldstats.com/stats3.htm>. Di akses pada Januari 2022.
- International Telecommunication Union. Measuring the Information Society Report 2017: ICT Development Index 2017 Lee, Eunhee, (2017). The Impact of E-Government on Corruption Control. *MPA/MPP/MPFM Capstone Projects*. 276.
- Kubbe. I. (2015). Corruption in Europe
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 136-150.
- Lee, K., Choi, S., Kim, J., & Jung, M. (2018). A Study on the Factors Affecting Decrease in the Government Korupsi and Mediating Effects of the Development of ICT and E-government—A Cross-Country Analysis. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 4(3), 41. doi:10.3390/joitmc4030041.
- Lu, L. (2019) Mobile payments—Why They Are So Successful? *Open Journal of Business and Management*, 7, 1131-1143. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2019.73078>
- Low, A. C., Lyydea Abryna Clive, C., Tan, Z. K., & Vinitha, K. (2020). Effects of cashless payment towards corruption in Malaysia Thailand and Singapore (*Doctoral dissertation, UTAR*).
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102. doi: 10.1016/j.techfore.2021.121102
- Mensah, I. K. (2019). Impact of Government Capacity and E-Government Performance on the Adoption of E-Government Services. *International Journal of Public Administration*, 1–9. doi:10.1080/01900692.2019.1628059
- Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2012. Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar Rachmawati, Rini. (2018). Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi. UGM PRESS.
- Rahadi, R. A., Nainggolan, Y. A., Afgani, K. F., Yusoff, Y. M., Muhammad, Z., Angelina, C., & Farooq, K. (2020). Conceptual model for cashless society: a literature synthesis. *European Journal of Business and Management Research*, 5(3).
- Rohmah, Y. M., & Trisriarini, N. (2021). Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid-19: Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1).
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.
- Sakil, A. H. (2017). ICT, youth and urban governance in developing countries: Bangladesh perspective. *International Journal of Adolescence and Youth*, 23(2), 219–234. doi:10.1080/02673843.2017.1330697.
- Sapitri, M. (2021). Hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Setor, T. K., Senyo, P. K., & Addo, A. (2021). *Do digital payment transactions reduce corruption? Evidence from developing countries*.
- Simarmata, J., Romindo, R., Putra, S. H., Prasetyo, A., Siregar, M. N. H., Ardiana, D. P. Y., ... & Jamaludin, J. (2020). *Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.
- Solinthone, Phonepaseuth., Tatyana Romyantseva. (2016). E-government implementation.

- MATEC Web of Conference. Doi: 10.1051/01066.
- Transparency International. (2019, Januari 21). Corruption Perceptions Index Explained [Video]. YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=9JoNjIffbPV0&t=16s>
- Transparency International. Corruption Perception Index. Dikutip dari: [https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff0Wdy35e0iJIKDLZzSs5hoUXgYjyp4Xgtirii8KjO8wV1cqM3k4M8IaAkn2EALw\\_wcB](https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff0Wdy35e0iJIKDLZzSs5hoUXgYjyp4Xgtirii8KjO8wV1cqM3k4M8IaAkn2EALw_wcB). Di akses pada November-Desember 2021.
- Transparency International. Global Corruption Barometer 2017: Citizen's voices from around the world. Dikutip dari: <https://www.transparency.org/en/gcb/global/global-corruption-barometer-2017>. Di akses pada November-Desember 2021.
- UNODC'S. *Action against corruption and economic crime*. Dikutip dari: <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/>. Di akses pada November-Desember 2021.
- Verani, R. O. (2021). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 77.
- World Bank. (2020). Anticorruption fact sheet. Dikutip dari: <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruptionfact-sheet>. Di akses pada Desember 2021.
- World Bank (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: the fight against corruption. Dikutip dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/pdf/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption.pdf>. Di akses pada Februari 2022.
- World Bank. (2017). Global Database Findex 2017. Dikutip dari: <https://globalfindex.worldbank.org/>. Di akses pada Oktober-Desember 2021.
- World Bank. (2017). Worldwide Governance Indicators. Dikutip dari: <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>. Di akses pada Desember 2021-Januari 2022.